

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Intelijen Kejaksaan memiliki peran strategis dalam memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor perbankan melalui kegiatan penyelidikan, pengumpulan data, serta analisis informasi yang menjadi dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Peran ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum secara preventif maupun represif yang dijalankan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kinerja intelijen kejaksaan dalam sektor perbankan telah membantu membuka indikasi adanya praktik korupsi seperti penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit, manipulasi laporan keuangan, dan kolusi antara pejabat bank dan pihak ketiga. Intelijen kejaksaan menjadi alat deteksi dini untuk memetakan pola dan jaringan korupsi yang sering kali bersifat kompleks dan terselubung.
2. Intelijen Kejaksaan menghadapi beberapa kendala dalam mengungkap dan menangani tindak pidana korupsi di sektor perbankan, antara lain prinsip kerahasiaan bank yang membatasi akses informasi, birokrasi internal perbankan yang berbelit, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Kendala-kendala ini memperlambat proses pengumpulan data dan tindak lanjut hukum. Meski demikian, Kejaksaan terus berupaya

mengatasi hambatan tersebut melalui kerja sama lintas lembaga dan pemanfaatan teknologi informasi.

B. SARAN

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menguasai tehnik pengumpulan data dan informasi intelijen, serta pembaharuan peralatan intelijen yang berbasis teknologi informasi. Perlu diberikan kewenangan yang lebih luas kepada Kejaksaan untuk melakukan penyadapan sejak tahap penyelidikan. Peningkatan Kapasitas SDM Intelijen diperlukan pelatihan khusus dan penambahan personel yang memiliki latar belakang atau pemahaman mendalam mengenai sistem perbankan agar mampu menganalisis indikasi tindak pidana korupsi secara lebih akurat.
2. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, intelijen kejaksaan perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga seperti OJK dan BPKP guna mempercepat akses informasi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi hal yang penting. Kejaksaan juga perlu memperbarui sistem kerja intelijen dengan peralatan modern serta memperluas jaringan informasi, termasuk melalui pemantauan media sosial. Di samping itu, koordinasi antarinstansi penegak hukum harus ditingkatkan agar proses penanganan kasus berjalan lebih efektif dan terarah.